

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Serangan terhadap menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan Gedung Pentagon, Amerika Serikat pada 11 September 2001 atau yang biasa dikenal dengan sebutan 9/11 membuat isu terorisme kembali mencuat dalam dinamika global. Hampir 3000 korban meninggal pada peristiwa tersebut dan kelompok Islam Sunni radikal, Al Qaeda, di anggap adalah pihak yang bertanggungjawab atas kejadian ini. Osama bin Laden, pemimpin kelompok tersebut menjadi orang yang paling di cari, Amerika Serikat pun menetapkan kebijakan global *war on terror* (BBC.co.uk). G.W.Bush yang menjabat sebagai presiden AS pada saat itu mengajak para pemimpin dunia untuk bersama-sama menghadapi terorisme dengan pidatonya yang terkenal, “*you are either with us or with the terrorist*” (VOAnews, 2009). Sejak peristiwa tersebut, masyarakat internasional juga terjangkit *Islamophobia*, Islam seringkali dikaitkan dengan gerakan-gerakan radikal dan terorisme. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa terorisme menjadi satu kekuatan yang dapat melancarkan aksi kekerasan yang mengatasnamakan paham radikal guna menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma yang diyakini.

Indonesia sendiri turut mengancam aksi serangan terorisme tersebut, namun Presiden Megawati masih menolak memberikan komitmen lebih jauh mengenai pemusnahan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia yang dianggap memiliki kaitan dengan Al Qaeda. Penolakannya tersebut karena pemerintah Indonesia masih ragu apakah benar jika gerakan radikal Islam merupakan pelaku aksi teror yang selama ini melakukan aksinya di Indonesia (Yustiningrum, 2014, hal. 35). Hingga aksi terorisme di Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi alarm yang

membangunkan kesadaran pemerintah akan adanya jaringan kelompok terorisme di Indonesia. Bom meledak di dua tempat hiburan malam yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan yang berasal dari Australia dan Eropa. Ledakan bom tersebut menelan nyawa yang tidak sedikit, setidaknya peristiwa tersebut menewaskan 187 orang dan 385 orang lainnya luka-luka yang terdiri dari berbagai negara. Lewat investigasi yang dilakukan setelah peristiwa tersebut, pelaku bom bunuh diri tersebut merupakan anggota dari jaringan Islam radikal di Indonesia yang biasa dikenal dengan nama Jamaah Islamiyah atau JI. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan surat kepada Ketua Komite Sanksi PBB pada tanggal 23 Oktober 2002 yang berisikan dukungan untuk memasukkan JI ke dalam *New Consolidated List Pursuant to Security Council Resolution*. Tragedi Bom Bali I, biasa disebut, terjadi selang sepuluh bulan dari teror di Singapura yang menarget sasaran yang dianggap berhubungan dengan Amerika Serikat atau negara Barat lainnya yang juga menewaskan banyak orang (Ramakrishna & Tan, *Is Southeast Asia a "Terrorist Haven"?*, 2003, hal. 1-2).

Indonesia kembali didera serangkaian aksi terorisme setelah Tragedi Bom Bali I. Kali ini, bom meledak di Hotel JW Marriot, Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003. Bom tersebut diangkut mengendarai Toyota Kijang dan menewaskan 14 orang serta 156 orang terluka. Lalu setahun kemudian, giliran Kedutaan Besar Australia yang diserang oleh aksi teror sehingga menewaskan 10 orang dan 200 lainnya terluka. Selanjutnya, Pulau Bali kembali menjadi sasaran serangan teror bom. Tragedi Bom Bali II pada Oktober 2005 menewaskan 26 orang dan 100 orang lainnya luka-luka (Cnn.com, 2005). Setelah Tragedi Bom Bali II, ibukota digemparkan dengan aksi terorisme pada 17 Juli 2009, Hotel J.W Marriot dan Ritz Carlton kembali di bom. Peristiwa tersebut menyebabkan 60 orang terluka yang termasuk 6 di antaranya adalah warga negara Amerika Serikat. (Matondang, 2016).

Selain menghilangkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, aksi-aksi tersebut juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan rasa aman dalam masyarakat (Sukawarsini Djelantik, 2010, hal. 1). Adanya persepsi internasional tentang kondisi Indonesia pasca serangkaian aksi teroris berdampak buruk pada Indonesia. Tragedi Bom di Bali dan serangkaian teror lainnya menimbulkan persepsi tentang kekerasan dan ancaman personal terhadap keamanan orang asing di Indonesia yang menyebabkan sejumlah negara menerapkan *travel warning* bagi warganya untuk bepergian ke Indonesia. Kerugian besar yang dialami oleh sektor pariwisata Bali memberi dampak yang tidak kecil untuk Indonesia. Adanya penurunan sektor pariwisata ini mengurangi penerimaan devisa negara yang pada akhirnya menyulitkan pemulihan perekonomian Indonesia, data penurunan wisatawan asing dari beberapa negara tergambar dari tabel berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara**

| Negara Asal     | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Amerika Serikat | 160 982   | 130 276   | 153 268   | 157 936   | 130 963   | 155 652   |
| Eropa           | 833 004   | 605 904   | 720 706   | 798 408   | 730 398   | 796 730   |
| Negara ASEAN    | 2 085 736 | 2 083 320 | 2 431 154 | 2 174 006 | 2 328 345 | 2 490 076 |
| Australia       | 346 245   | 268 538   | 406 389   | 391 862   | 226 981   | 314 432   |

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Tabel 1.2 Investasi Asing 2004 - 2013

| Tahun       | Investasi                 |                             | Tenaga Kerja |               |            |           |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|
|             | Rencana<br>(Milyar<br>Rp) | Realisasi<br>(Milyar<br>Rp) | Indonesia    |               | Asing      |           |
|             |                           |                             | Rencana      | Realisasi     | Rencana    | Realisasi |
| -1          | -2                        | -3                          | -4           | -5            | -6         | -7        |
| 2004        | 3 397.47                  | 952,12                      | 7 098        | 2 390         | 307        | 8         |
| 2005        | 1 864.05                  | 888,75                      | 8 127        | 3 856         | 123        | 28        |
| 2006        | 2 069.65                  | 900,49                      | 9 622        | 2 962         | 29         | 2         |
| 2007        | 1 668.10                  | 497,4                       | 5 328        | 3 271         | 17         | 14        |
| 2008        | 9 075.11                  | 735,07                      | 8 977        | 2 946         | 333        | 8         |
| 2009        | 4 304.03                  | 2 098.16                    | 8 515        | 2 340         | 335        | 4         |
| 2010        | 2 503.80                  | 4 210.16                    | 1 766        | 1 837         | 71         | -         |
| 2011        | 6 966.17                  | 4 386.96                    | 16 978       | 16 978        | 546        | 546       |
| 2012        | 7 435.09                  | 4 478.77                    | 3 534        | 3 534         | 3          | 0         |
| <b>2013</b> | <b>6 805.16</b>           | <b>3 634.97</b>             | <b>5 475</b> | <b>21 633</b> | <b>137</b> | <b>5</b>  |

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Secara umum, perekonomian nasional berdampak negatif. Usaha pemerintah menuju pemulihan ekonomi terkendala terhambatnya kegiatan investasi, produksi, dan ekspor. Memburuknya sentimen investor dalam pasar saham juga hal lain yang dirasakan Indonesia. Indeks saham yang tercatat di BEJ anjlok cukup signifikan dan berada di posisi terendah dalam dua tahun belakangan sebelum terjadinya peristiwa terorisme. Dalam analisisnya, Bank Dunia mengatakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan konsumen bukan hanya di Indonesia namun juga merambah keseluruhan kawasan Asia Tenggara dan Pasifik (Liputan6, 2012).

Selain memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia, rangkaian tindakan terorisme di Indonesia tersebut membuat baik masyarakat regional dan internasional memberi perhatian pada kemunculan gerakan radikal Islam di Indonesia yang semakin menjamur. Media dan analis Barat banyak memberikan prediksinya bahwa Indonesia akan menjadi ladang yang subur bagi pertumbuhan paham-paham radikal dan sarang yang aman bagi para teroris (Sukma, 2003, hal. 347). Hal

tersebut diperparah dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut namun sayangnya belum diiringi dengan pengamanan perbatasan yang memadai. Belum lagi adanya berbagai masalah dalam negeri pada masa itu dimana pemerintahan pusat tidak memiliki pengawasan keuangan yang ketat, masih banyaknya gerakan separatis, masalah korupsi, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Karakteristik-karakteristik tersebut membuat Indonesia menjadi tempat yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya teroris dan dikhawatirkan dalam jangka panjang akan mengacaukan stabilitas di Indonesia dan keutuhan nasional (Sukma, 2003, hal. 347). Jika kondisi di Indonesia tersebut tidak segera diatasi, terorisme akan terus menjadi ancaman bukan hanya bagi Indonesia namun juga terhadap keamanan dan stabilitas kawasan (Sukma, 2003, hal. 351).

Aksi terorisme di Bali juga menunjukkan bahwa adanya kehadiran jaringan terorisme internasional di Indonesia yang memiliki kaitan dengan Al Qaeda. Terlebih Indonesia di kenal sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, meskipun masyarakatnya toleran dan menerapkan bentuk Islam moderat, kekhawatiran tentang Al Qaeda menggunakan Indonesia sebagai basis gerakannya di Asia Tenggara dalam upaya melawan “orang-orang kafir”, Yahudi, dan Amerika Serikat tetap ada (Council on Foreign Relations, 2005). Dalam tataran regional, keterkaitan antara terorisme di Indonesia dengan jaringan internasional, yaitu salah satunya dengan Al Qaeda, juga semakin menguat. Indonesia bahkan dianggap sebagai negara tempat asal tokoh-tokoh pendiri JI, seperti Abdullah Sungkar dan Ridwan Ismauddin alis Hambali. Keberadaan jaringan JI di Indonesia menunjukkan kunci ancaman aksi terorisme di Asia Tenggara. Bahkan Lee Kwan Yew, menteri senior Singapura mencap Indonesia sebagai negara “sarang para teroris” (Alami A. N., 2014, hal. 84).

Kenyataan bahwa Indonesia didera serangkaian teror bom yang memakan banyak korban baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing serta pelakunya yang merupakan kelompok jaringan terorisme internasional membuktikan bahwa radikalisme dan terorisme memang sudah melewati batas-batas negara. Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk melawan ideologi radikal seperti dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai toleransi, dan saling menghormati. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia juga telah meluncurkan program untuk menempatkan ilmuwan Islam internasional dan bereputasi baik di pusat perlawanan terhadap narasi radikal dan menyoroti kesenjangan yang ada dalam propaganda yang menyesatkan. Namun terlepas dari usaha dalam negeri yang dilakukan, koordinasi dengan negara-negara di kawasan harus kembali diperkuat (Jawaid, 2017). Karakter terorisme di Indonesia menandakan adanya keterkaitan antara internasional dan domestik yang menjadi dorongan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral dan multilateral (Sriyanto, 2014, hal. 121).

Tidak hanya dengan menggunakan kekuatan militer atau penegakan hukum, diplomasi dapat juga digunakan sebagai alat untuk melawan terorisme. Diplomasi dalam konteks penanganan terorisme memiliki peran sebagai upaya mengajak negara lain untuk melakukan kerjasama melawan terorisme dan menemukan cara membuat tuntunan dalam menangani terorisme. Dengan kekuatan utama diplomasi yaitu persuasi dan negosiasi, negara satu dapat mengajak negara lain yang memiliki hubungan kerjasama tersebut untuk melawan terorisme dari akarnya atau melawan elemen di dalam suatu negara yang mendukung teroris dan organisasi teroris di lain tempat (David Litt, 2011, hal. 155).

Salah satu bentuk upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia adalah diplomasi pertahanan karena hubungan dan kerjasama dalam dan luar negeri berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara. Oleh sebab itulah, semua kemampuan dan sumber daya

pertahanan yang dimiliki bangsa dapat diperdayakan untuk mencapai kepentingan nasional (Simamora, 2013, hal. 30). Kebijakan luar negeri Indonesia sendiri dipengaruhi oleh upaya menangkap pelaku teroris dan menangani terorisme. Hal ini dijadikan sebagai modal untuk memperbaiki citra Indonesia dan mengembalikan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Hal ini menjadi penting karena negara dengan citra yang baik akan lebih mudah untuk membangun kerjasama dengan negara lain (Yustiningrum, 2014, hal. 35).

Hal inilah yang mendorong Indonesia memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai lingkungan terdekat. Pada KTT ASEAN VIII di Phnom Penh pada November 2002 juga mengeluarkan *Declaration on Terrorism*. Mekanisme utama kerjasama pemberantasan terorisme di ASEAN dilakukan melalui AMMTC dan SOMTC dan Indonesia dipercaya menjadi pemimpin di bidang *counter terrorism* sekaligus menjadi ketua *Working Group on Counter Terrorism*. Dalam KTT tersebut juga, selain mengecam tindakan terorisme di Bali dan Filipina, menyatakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama dan suku bangsa tertentu (kemlu.go.id, 2015). Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam ADMM Plus dan ASEAN *Regional Forum* dimana keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerjasama di kawasan untuk menangani terorisme salah satunya merupakan upaya untuk memperbaiki citra Indonesia itu sendiri.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Tujuan nasional Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi terganggu dengan adanya serangkaian aksi terorisme di Indonesia yang berdampak tidak hanya pada perekonomian dalam negeri namun juga pada memburuknya citra Indonesia di mata internasional. Citra negara dianggap penting karena negara dengan citra yang baik akan lebih mudah untuk membangun

kerjasama dengan negara lain dan juga mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Citra dan kondisi Indonesia saat ini akan berpengaruh pada pertumbuhan Indonesia kedepannya dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Selain fokus dengan membenahi kondisi dalam negeri, Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional yang salah satu tujuannya untuk memperbaiki citra Indonesia dengan menggunakan diplomasi pertahanan sebagai salah satu bentuk diplomasinya dimana implementasi diplomasi pertahanan memiliki tujuan untuk membangun rasa saling percaya, membangun kapasitas, dan sarana untuk mewujudkan tujuan luar negeri dan keamanan yang lebih luas.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini akan berfokus pada upaya Indonesia untuk memperbaiki citra dalam isu terorisme dari perspektif diplomasi pertahanan. Rumusan masalah tersebut kemudian dirumuskan ke dalam dua pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

- a. Bagaimana implementasi diplomasi pertahanan Indonesia di ASEAN sebagai upaya menghadapi permasalahan terorisme di kawasan?
- b. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia di ASEAN dapat berkontribusi dalam memperbaiki citra keamanan Indonesia dalam permasalahan terorisme?

### **1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis implementasi diplomasi pertahanan Indonesia di Asia Tenggara sebagai upaya menghadapi permasalahan terorisme di kawasan.
- b. Menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia di Asia Tenggara dapat berkontribusi dalam memperbaiki citra keamanan Indonesia dalam permasalahan terorisme.

### **1.3.2. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini adalah mengenai implementasi diplomasi pertahanan Indonesia dalam forum multilateral dalam kerangka ASEAN. Penelitian ini ingin membahas aspek lain dari tujuan diplomasi pertahanan yaitu citra negara ketika menjalankan diplomasi pertahanan yang biasanya digunakan dalam konteks hubungan atau konflik antar negara

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, perlu mengadakan diplomasi pertahanan agar dapat memperbaiki citranya yang sebelumnya dianggap sebagai sarang teroris dan tidak aman. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat upaya diplomasi pertahanan yang dijalankan Indonesia untuk memperbaiki citra Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu diplomasi pertahanan yang saat ini masih terus berkembang. Penelitian ini dapat dijadikan suatu penelitian yang memberikan contoh nyata dari adanya teori diplomasi pertahanan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan suatu kajian kepada pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, serta kepada *stakeholders* lainnya seperti organisasi pemerintah dan non pemerintah lainnya. Penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan evaluasi sekaligus menambah rekomendasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan tersebut dalam merumuskan strategi diplomasi pertahanan dalam upaya memperbaiki citra Indonesia pasca aksi-aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif-analisis). Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari informasi dengan melakukan wawancara terstruktur, selebihnya data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah upaya diplomasi pertahanan Indonesia dan strateginya untuk memperbaiki citra kemanan Indonesia setelah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Peneliti membatasi fenomena yang di teliti yaitu sejak terjadi Tragedi Bom Bali I pada tahun 2002 hingga tahun 2016 saat terjadi aksi terorisme di kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta yang dilakukan oleh jaringan ISIS di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan baik dalam mengumpulkan data dan analisis data. Sebagian besar narasumber wawancara dari pihak Indonesia berada di wilayah Indonesia sehingga sangat memungkinkan bagi peneliti melakukan wawancara langsung (*face to face interview*). Kemudian, untuk mendukung data primer, peneliti melakukan studi pustaka melalui perpustakaan yang berada di Indonesia dan publikasi *online* yang dapat diakses secara bebas.

### 1.6. Sistematika Penulisan

**Bab 1 Pendahuluan.** Bab 1 berisi tentang isu terorisme menjadi perhatian internasional setelah terjadinya peristiwa 9/11. Peristiwa ini juga berdampak terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, dan mendapat perhatian besar setelah aksi terorisme tragedi Bom Bali I dan serangkaian aksi terorisme lainnya. Selanjutnya, bab ini berisi rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan gambaran desain penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab 2 Tinjauan Pustaka.** Dalam bab 2 berisi tentang kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian. Kerangka teori yang digunakan antara lain.

**Bab 3 Metode Penelitian.** Bab ini berisi tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, dan rencana jadwal penelitian.

**Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian** yang berisi tentang penjabaran data-data yang diperoleh di lapangan mengenai upaya diplomasi Indonesia menanggulangi masalah terorisme dan upaya memperbaiki citra negara di mata internasional. Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan landasan teori dan konsep yang dijabarkan pada bab dua.

**Bab 5 Kesimpulan dan Saran.** Bab 5 terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian tesis ini. Selanjutnya, bab ini juga berisi saran dan rekomendasi secara teoritis dan praktis.